



BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, sehingga pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 15 Agustus 2025

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali**



Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum..... 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN LALU 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 26

2.4 Review Terhadap RKPD 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 40

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41

3.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	41
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026	43
3.3.1	Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	43
3.3.2	Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		50
4.1	Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026	51
BAB V PENUTUP		55
5.1	Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian	56
5.2	Kaidah Pelaksanaan	56
5.3	Rencana Tindak Lanjut	57
LAMPIRAN		59



DAFTAR TABEL



Tabel 2. 1	Capaian Sasaran Strategis.....	12
Tabel 2. 2	Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.....	14
Tabel 2. 3	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	16
Tabel 2. 4	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	17
Tabel 2. 5	Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Kesekretariatan	21
Tabel 2. 6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	28
Tabel 3. 1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	42



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. 1	Hubungan Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Dokumen Lainnya	5
Gambar 3. 1	Potensi Perikanan Tangkap.....	45
Gambar 3. 2	Potensi Perikanan Budidaya	46
Gambar 3. 3	Potensi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	46
Gambar 3. 4	Garam Tradisional Lokal Bali	47
Gambar 3. 5	Potensi Perikanan Hias Laut	48



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.



1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, sebagaimana amanat pemerintah pusat, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip *Money Follow Function* diubah menjadi *Money Follow Program* serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial.

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), Pemberdayaan masyarakat pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan, Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap, dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Untuk itu, kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi, Fasilitas pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN), Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Fasilitas pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara dalam pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 diajukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi, Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2026 diverifikasi oleh

Bappeda Provinsi Bali selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari Gubernur Bali.

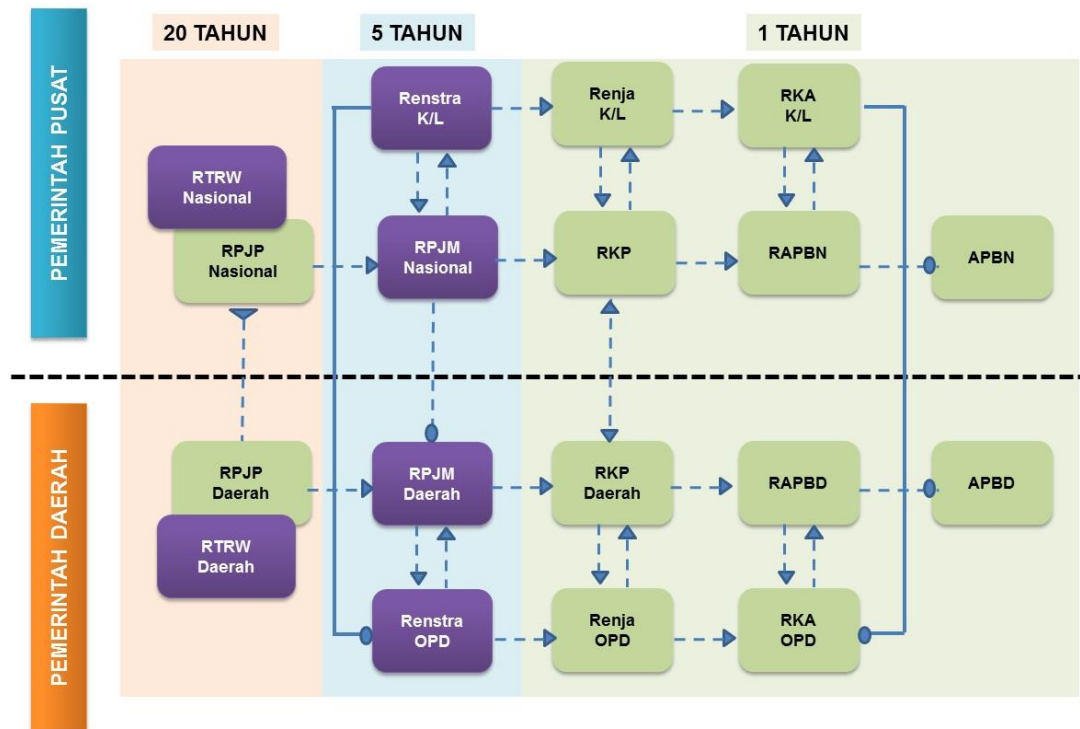
Terkait dengan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2026 pada bulan Maret Tahun 2025, didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 diawali dengan mengajukan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali dengan materi orientasi meliputi tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat daerah dan kesiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat,

maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1. 1
Hubungan Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Dokumen Lainnya



Mengacu pada gambar di atas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD mengacu pada RKPD sebagai dampak adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi, dengan mengacu pada Renstra PD, Renja PD dan KUA/PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya akan menjadi acuan DPA PD, yang merupakan penjabaran dari APBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Bali Nomor 2); dan
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa maksud penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 khususnya Rencana Kerja Tahun 2026 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2026 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2026 adalah :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2025;
2. Merancang program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2026;
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
4. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 dengan RKPD tahun 2026.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Pada Bab III Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan

sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Bab IV Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA

DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN PROVINSI

BALI TAHUN LALU

Bab II berisi tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi berupa Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Review terhadap RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan), kemudian di tetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan; dengan berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,79%	4,41%	76,17%	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67%	(Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,22%	91,97%	91,77%	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha	2%	4,2%	210%	$X_{kp} = (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) / 4$
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81	100%	Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa **pada Tahun 2024 kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali tercatat sebesar 4,41%** dari total kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 13,43% pada Triwulan III Tahun 2024, Kontribusi terbesar PDRB berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Bali pada periode ini adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai sekitar 20,64% dari total PDRB Provinsi Bali. Kontribusi yang besar dari sektor tersebut mencerminkan struktur ekonomi Provinsi Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata. **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di tahun 2024 sebesar 4% dari 6% yang telah di targetkan pada tahun 2024**, data ini diperoleh berdasarkan jumlah pemanfaatan ruang laut berdasarkan data BPSPPL Denpasar sebanyak 523 Pelaku Usaha dengan Jumlah Verifikasi yang dikeluarkan sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 19 Pelaku Usaha.

Meningkatnya kesejahteraan Nelayan di Provinsi Bali di hitung melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 91,97% di Tahun 2024, NTN dihitung dari Indeks Harga yang diterima nelayan dibagi dengan Indeks Harga yang dibayar nelayan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk biaya produksi. **Pada Sasaran terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan**

perikanan dihitung melalui Indeks Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha yang di kelompokkan berdasarkan sub sektor antara lain (1) kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut; (2) kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap; (3) kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya; dan (4) kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang berkaitan dengan Sasaran Strategis ini baru melaksanakan kegiatan terkait Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Kewenangan Provinsi serta kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menyebabkan **Capaian Sasaran ini berdasarkan sampel yang diawasi telah tercapai sebesar 4,2% dari 2% yang telah di targetkan.**

Pada sasaran meningkatnya manajemen kinerja organisasi di gunakan tolak ukur **Nilai Manajemen Kinerja Organisasi Tahun 2024 tercapai sebesar 81 Nilai atau sudah tercapai sebesar 100%**, pengukuran di lakukan untuk melihat kinerja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator kinerja dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,79%	4,41%	76,17%	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan produksi seperti melakukan peningkatan jumlah benih ikan yang dihasilkan oleh UPTD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							P2B, meningkatkan tingkat konsumsi ikan
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67%	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilakukan adalah menyusun penetapan KKP Jembrana dan KKP Bali Selatan yang masih sedang berproses
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,19%	91,97%	91,77%	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan alat tangkap dan rumpon untuk peningkatan produksi nelayan
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha	2%	4,2%	210%	Pencapaian realisasi telah melampaui target	Sudah dilaksanakan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81 Nilai	100%	Pencapaian realisasi telah mencapai target	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis di atas terukur dan dapat dicapai meskipun realisasinya **belum semua mencapai 100%**. Terhadap permasalahan yang muncul dapat ditangani melalui solusi antara lain (1) Sasaran Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB solusi yang dilakukan antara lain Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui peningkatan pengajuan penerbitan izin usaha perikanan serta peningkatan pengelolaan budidaya perikanan di darat, kemudian untuk solusi Meningkatkan konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan melalui peningkatan unit usaha pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar izin usaha serta peningkatan mutu produk hasil perikanan; (2) Sasaran Strategis Mengoptimalkan pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil solusi yang dilakukan antara lain Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan melalui peningkatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan pengajuan verifikasi teknis kesesuaian ruang perizinan berusaha, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) Sasaran Meningkatnya kesejahteraan Nelayan solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap melalui peningkatan produksi perikanan tangkap serta peningkatan usaha perikanan tangkap di pelabuhan; (4) Sasaran Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui menyelenggarakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan serta menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepada unit usaha perikanan; dan (5) Sasaran Strategis Meningkatnya manajemen kinerja organisasi solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui menyusun laporan keuangan dengan baik, peningkatan layanan administrasi umum perangkat daerah, mewujudkan pengadaan barang milik daerah, peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, serta mewujudkan barang milik daerah dalam kondisi baik.

Kemudian untuk mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut dapat diamati pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	5,79%	4,41 %	76,17 %	3,331,769,111.00	2,983,325,601.00	89,54
2	Mengoptimalkan pengelolaan	6%	4%	66,67 %	1,250,324,000.00	1,110,012,300.00	88,78

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil						
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	100,19%	91,97%	90,00%	609,810,120.00	575,279,310.00	94,33
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2%	4,2%	210%	713,278,940.00	544,816,716.00	76,38
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	81	81	100 %	970,410,101.00	812,362,920.00	83.71
TOTAL					33,208,808,918.00	26,487,606,284.00	89.88

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut dengan jumlah dana yang dianggarkan cukup besar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik walaupun capaian realisasi sudah tergolong cukup Baik **Tahun 2024 sebesar Rp.26,487,606,284.00-** dengan target tahun 2024 sebesar Rp. 33,208,808,918.00- dengan tingkat **capaian sebesar 89,88%.**

Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja tersebut dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, Dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil	44%	44%	100%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	<i>Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil</i>	102.575,33 Ha	44.813,58 Ha	43,69%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan</i>	4 Kelompok	16 Kelompok	400%	Menunjang
2	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2%	3,03%	151,5%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah produksi perikanan tangkap</i>	103.696,1 Ton	114.231,55 Ton	110,16%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</i>	<i>Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan</i>	8.000 Ton	5.190 Ton	64,87%	Menunjang
3	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	1,75%	87,5%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	<i>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</i>	32.645,12 Ton	33.180,96 Ton	102 %	Menunjang
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2%	2,20%	110%	Menunjang
			Tingkat Konsumsi Ikan	48,68 Kg/Kpt/Tahun	51,13 Kg/Kpt/Tahun	105%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		<i>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	<i>Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina</i>	25 Unit Usaha	38 Unit Usaha	165%	Menunjang
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2%	4,2%	210%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil</i>	30 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	33%	Menunjang
UPTD Produksi Perikanan Budidaya							
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	1,75%	87,5%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	<i>Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas</i>	1.250.000 Ekor	3.759.775 Ekor	301%	Menunjang
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan							
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Program Pengolahan dan	Persentase Peningkatan Daya Saing	2%	2,20%	110%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		Pemasaran Hasil Perikanan	Produk Hasil Perikanan				
		<i>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	<i>Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan</i>	2.500 Rekomendasi	4.010 Rekomendasi	160%	Menunjang
UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil	Persentase Efektivitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71%	95,94%	135,12%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</i>	4	3	75%	Menunjang
UPTD Pelabuhan Perikanan							
1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %	3,03%	151,5%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	<i>Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan</i>	8.000 Ton	5.190 Ton	65%	Menunjang

Terdapat 5 (lima) Program yang menunjang Capaian Kinerja tersebut. Pada Sasaran Strategis Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau

Kecil terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil, Pada Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan Nelayan terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, kemudian pada Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB terdapat 2 (dua) program yang menunjang yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta pada Sasaran Strategis Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Selain kelima program di atas, Program dan Kegiatan pendukung pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Kesekretariatan

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali							
1	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	81 Nilai	100%	Pendukung
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	Pendukung
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan	100%	100%	100%	Pendukung

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
			<i>disampaikan tepat waktu</i>				
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
UPTD Produksi Perikanan Budidaya							
1	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	81 Nilai	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
		<i>Pemerintah Daerah</i>					
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	81 Nilai	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang</i>	100%	100%	100%	Pendukung

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
			<i>tersedia dengan baik</i>				
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	81 Nilai	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
		<i>Pemerintahan Daerah</i>					
UPTD Pelabuhan Perikanan							
1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	81 Nilai	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	100%	100%	Pendukung

Jika dilihat pada tabel di atas capaian Kegiatan pendukung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 mencapai 100%. Pada capaian Program Tahun 2024 sudah mencapai 100%.

2.3 Isu - Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan untuk menunjang Percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tanggung dan Sejahtera serta Peningkatan Daya Saing Daerah. Secara umum sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumber daya dapat pulih (*Renewable resources*), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (*Nonrenewable resources*), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*Environmental services*). Sumber daya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumber daya tidak dapat pulih di antaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumber daya energi kelautan terdiri dari : OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Permasalahan yang teridentifikasi pada tahun 2025 antara lain yaitu belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB, belum optimalnya angka konsumsi ikan di provinsi bali, serta belum terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara itu yang menjadi isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2026 yaitu perlunya mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tingkat konsumsi dan produksi produk hasil olahan perikanan juga perlu ditingkatkan, serta fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sub sektor perikanan tangkap, sub sektor perikanan

budidaya, dan sub sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapat perhatian yang lebih.

2.4 Review Terhadap RKPD

Dalam Review terhadap RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama pada tahun 2026. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2025, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan indikator sudah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (**Lampiran I**).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Perangkat Daerah ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2. 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	<i>Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat</i>
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	100 %	<i>= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%</i>
			Persentase Efektivitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	74 %	<i>= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%</i>
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 %	<i>= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)</i>

4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 %	$= ((\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1) / \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1 \times 100\%)$
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	4 %	<i>Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = $(KPU/JKPU) \times 100\%$ KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan</i>
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2 %	$= ((\text{Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun } n - \text{Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun } n-1) / \text{Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun } n-1 \times 100\%)$
			Tingkat Konsumsi Ikan	50,64 Kg/ Kapita/ Tahun	AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
			Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 %	$= ((\text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } n - \text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } n-1) / \text{Jumlah sampel yang di uji tahun } n-1 \times 100\%)$

Terdapat masukan dan saran dari Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu:

1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Dearah Provinsi Bali (Dr. I Wayan Serinah, S.Sos, M.Si)

Yang menjadi poin penting yaitu bagaimana meningkatkan PAD khususnya dari aspek perikanan dan kelautan secara keseluruhan. Secara prinsip bahwa pemerintahan sekarang itu meminta kita untuk selalu menekankan pada efisiensi Sehingga diskusi dan juga hasil forum perangkat daerah ini mudah-mudahan secara bertahap sudah mulai menyusun rancangan tahapan-tahapan untuk bisa mengakomodir 13 program prioritas yang menjadi kewenangan Dinas kelautan dan Perikanan. Yang berikutnya adalah terkait dengan nilai tukar nelayan kita yang masih sangat-sangat rendah. Beberapa data yang saya lihat datanya tidak sama. Kalau dibaca data di paparan sekitar 91%, kalau dibuku bali satu data tahun 2024 itu sudah di atas 100%, Yang menarik dari Meta AI, Artificial Intelligence itu di 94%. Oleh karena itu data ini perlu di sinkronisasikan agar data yang di publikasikan yaitu data yang akurat, dan yang paling penting adalah bagaimana mencapai target di atas 100%. Sehingga kita bisa benar-benar memperhatikan masyarakat yang menggeluti profesi sebagai nelayan. Bagaimana pengelolaan untuk ikan yang di air tawar dari segi inovasi makanan yang berkembang, demikian juga untuk ikan yang dari laut. Perlu di perhatikan juga untuk daging kambing dulu hanya sate tusuk akan tetapi sekarang sudah ada sate lilit, lawar kambing dan lain sebagainya, begitu di pasarkan makanan tersebut ramai di minati. Oleh karena itu apakah ada inovasi untuk produk khas laut misalnya di jadikan olahan lawar atau sate, mungkin modelnya perlu di perbanyak sehingga benar-benar konsumsi ikan itu bisa

meningkat secara signifikan. Selain itu kita juga harus gencar mempromosikan produk olahan berupa ikan ini melalui media sosial seperti instagram, tiktok, facebook dan lain sebagainya yang banyak di minati oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh jika saya di lawar ikan, ketika di posting di media sosial yang mengunjunginya sedikit, karena memang penggemarnya sedikit dan jumlah followersnya juga sedikit. Tapi coba di undang yang memiliki followers banyak, pastinya jumlah penggemarnya akan meningkat, sehingga nantinya ketika sudah olahan ikan sudah di gemari memungkinkan NTN akan meningkat dan Tingkat Konsumsi ikan di Provinsi Bali akan meningkat juga.

2. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (Nyoman Resmini)

Sedikit saya informasikan kepada Bapak Kepala Dinas karena melihat daripada situasi anggaran kita Provinsi Bali, apalagi dengan adanya Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang sejak dahulu anggaran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan paling rendah dan dengan adanya aturan ini barangkali masih paling rendah, sehingga akan sulit untuk membicarakan bagaimana meningkatkan PAD dari sektor Kelautan dan Perikanan. Semoga hal itu tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai visi dan misi, apalagi dengan adanya makan bergizi gratis sudah barang tentu protein yang lebih banyak dapat di jangkau dari makan ikan. Kami dari HNSI menghimbau bahwa sudah terdapat perda Bendega yang sudah berkaitan dengan perda RTRW provinsi Bali. Untuk hal tersebut saya mohon kepada Bapak Kepala Dinas beserta Jajarannya yang terkait untuk bisa mensosialisasikan perda Bendega ini di seluruh Kabupaten/Kota. Sehingga saya mohon kepada Bappeda agar lebih memperhatikan sektor kelautan dan perikanan, terutama dari segi anggaran

karena selama ini Dinas Kelautan dan Perikanan selalu terendah anggarannya, apalagi sekarang domain kita adalah bagaimana meningkatkan visi masyarakat, tanpa anggaran kita tidak mungkin bisa menjangkau semuanya. Kami dari HNSI menghimbau dalam mensosialisasikan perda Bendaga ini dengan lengkap sampai ke masyarakat pesisir, karena kami ingin perda Bendega ini melayani hampir sama dengan Subak. Jangan kita melihat domain itu hanya di darat, ada subak-subak barangkali sudah terkenal di seluruh Indonesia, malah di mancanegara. Tetapi saya ingin Bendega ini juga mempunyai nilai Kearifan Lokal yang sama dengan Subak, karena di Bendaga ini mempunyai Palemahan, Pawongan, dan Parahyangan ada Pesisir. Sekarang ini sering terjadi perdebatan antara apakah pesisir itu punya apa, karena nilai yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam wilayah itu, untuk bagaimana kita memahami nilai itu agar tidak merasa tergusur, merasa nyaman bekerja sudah barang tentu kita harus melakukan sosialisasi. Dalam melakukan sosialisasi tidak bisa jalan kaki, tidak bisa tanpa sarana dan prasarana, harus ada yang membantunya dan sudah barang tentu kaitannya dengan anggaran. Jika seperti ini bagaimana kita berbicara terkait kesejahteraan dan terkait pidato bapak Presiden bagaimana Perikanan menjadi barometer dalam mensejahterakan masyarakat.

3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung (I Nyoman Suardana, S.Sos, M.M)

Memang tadi sudah disampaikan oleh pak Kadis banyak sekali kaitan dengan forum perangkat daerah ini. Mungkin kami memberikan masukan dan informasi bahwa benar masalah benih kita di kabupaten, tetapi secara umum memang permasalahan yang disampaikan tadi itu sama dengan di kabupaten-

kabupaten kota. Tentu saja dari teman-teman yang ada di kabupaten yang paling utama memang tadi belum terlihat masalah pakan. Karena memang sering kami sampaikan ke pak Kadis pakan, karena pakan sampai sekarang kan lumayan harganya. Bahkan saya pernah bilang kenapa kita tidak dipersamakan dengan dinas atau instansi lain ada subsidi pupuk, kenapa kita tidak ada subsidi pakan. Dan memang jawabannya adalah aturannya. Karena aturannya tidak memperbolehkan, kalau bahasa aturannya tidak memperbolehkan, Undang-Undang Dasar saja bisa di rubah kenapa undang-undang ataupun peraturan pemerintah ataupun hal yang lain tidak bisa di rubah. Yang selanjutnya pak tadi juga saya belum melihat program kegiatan yang disampaikan tadi menjurus kepada lokasinya yang ada di masing-masing Kabupaten. Memang secara umum contoh kami di Badung kira-kira di tahun 2026 apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya dari dinas Kelautan. Hal ini penting agar kami di kabupaten juga belum melaksanakan forum perangkat daerah tingkat kabupaten biar ada sinergi nantinya. Apalagi kita di provinsi dan Kabupaten juga ada pimpinan bupati, wali kota, gubernur yang baru agar bersinergi juga. Karena kami di badung visi bupati adalah lebih mengarah kepada peningkatan kualitas pariwisata. Jadi memang benar pak perikanan itu mungkin dinomersekiatkan. Mungkin teman-teman Kabupaten lain juga merasakan kenapa? Karena sektor perikanan kalau kami umpamakan tidak jauh berbeda dengan dulunya di sektor perkebunan, sektor kehutanan atau pertanian. Kaitannya dengan Bendega dari HNSI memang benar tetapi kita jangan berkecil hati. Karena dalam Undang-Undang 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali di pasal 6 di sebutkan dalam wilayah Provinsi Bali terdapat desa adat dan subak, Bendega tidak diakui dalam Undang-Undang. Apakah ini

belum masuk atau bagaimana? Artinya tetap kita akan membuat Bendega apalagi sudah ada perda Bendega di Provinsi maupun di Kabupaten dan kami di Bandung memang sudah ada ketetapan tentang pembentukan Majelis Madya Bendega yang ada di kabupaten Bandung. Selanjutnya kami di kabupaten Bandung berencana untuk tahun 2026 itu akan mencoba Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di pantai timur Kedonganan. Terkait dengan hal itu mungkin dari sisi perizinan menjadi pemanfaatan ruang dan sebagainya, nanti akan mungkin mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali apakah memang dalam titik koordinat tersebut layak kita memelihara. Karena dari pimpinan juga menginginkan ada variasi kegiatan budidaya khususnya yang ada di laut, khususnya nanti akan kita coba kerapu atau hal yang lain. Hal yang selanjutnya memang terkait dengan NTN dan Tingkat Konsumsi Ikan. Apakah ini merupakan sebuah perilaku budaya kita? Memang kalau masalah konsumsi ikan di Bandung masih kecil, bahkan lebih kecil daripada provinsi. Kami di Bandung memang mencoba untuk tahun 2025 sampai 2029 nanti untuk bisa memberikan paket ikan kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan daripada konsumsi. Yang kami sasar memang adalah masyarakat ibu hamil dan balita yang berpotensi stunting, walaupun jumlah stunting memang tidak begitu banyak. Dan kita akan coba untuk memberikan perbulan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Barangkali kegiatan ini mungkin bisa sekali dikolaborasikan dengan provinsi karena di provinsi ada juga kegiatan gemar makan ikan yang terutama nanti rencana kami adalah pemberian paket ikan asil budidaya dengan jenis lele dengan nila. Kemudian yang menjadi kendala ataupun faktor penentu inflasi adalah ikan, khususnya ikan tongkol, akan tetapi ikan yang lain masih tetap ada. Apakah ini

memang dalam penentu inflasi hanya ikan Tongkol?. Memang ikan kalau kita lihat tidak setiap waktu ada, tapi ikan pasti selalu ada, tetapi jenis-jenis ikan tertentu tidak ada setiap waktu.

4. Universitas Udayana (Ir. I Wayan Restu, M.Si)

Yang saya lihat dan saya tekuni selama ini terkait pendapatan untuk sektor Kelautan dan Perikanan mengalir dari dua arah 1. Dari prinsip eksplorasi, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan 2. Yang belum tergarap dengan baik, yaitu *Empowerment Service* atau nilai jasanya. Hal ini yang belum tergarap akan tetapi menyimpan suatu *value* yang luar biasa, salah satunya potensi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida. Setiap hari kita melihat untuk satu visite di Nusa Penida per hari datang wisatawan dari 100 sampai 400 wisatawan, kemudian yang ke mangrove sekitar 250 sampai 600, jika dengan membayar Rp. 200.000,00- per orang potensinya sangat besar. Kalau kita lihat ini nanti secara akumulatif Provinsi Bali bisa meningkatkan PADnya. Kemudian terkait dengan Kawasan Konservasi, Provinsi Bali memiliki Tahura apakah ada infrastruktur dan landscape tentang pengembangan Tahura yang berbasis mangrove untuk tourisme, akan tetapi apakah untuk mangrove ini berada di bawah ke hutan atau yang lainnya, namun kalau kita berbicara ekosistem mangrove itu ada di dalam Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya berkaitan dengan NTN sebenarnya kami di Universitas Udayana dengan Pendidikan mahasiswa sudah banyak yang menghitung NTN ini bahkan dengan menggunakan statistik, ternyata hambatannya yang di temukan berkaitan dengan Data karena di Kecamatan Datanya itu tidak Konsisten. Kemudian dari segi perikanan budidaya air tawar juga perlu mendapatkan perhatian lebih jika kita lihat selama ini Masyarakat Bali dari konsumsi dan

kegiatan pemancingan masih sangat lemah, saya pernah melakukan survei di Mengwi, Badung dan Sekitarnya untuk lele saja bisa habis 20 Ton selama satu Bulan ini potensi yang sangat luar bisa akan tetapi kebanyakan berasal dari Jawa. Artinya Masyarakat Bali belum mampu membangun perikanan budidaya ini. Kemudian yang berkaitan dengan Inovasi saya melihat di beberapa negara khususnya di China ujung tombak dari proses produksi itu berada di market, jadi untuk membangun kapasitas lokal, mungkin Pemerintah Provinsi Bali bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun beberapa sentra pasar yang terintegrasi, misalnya disana ada kolamnya di sampingnya ada pasar ikannya, ada kuliner yang berbasis ikan.

5. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali (Ida Ayu Komang Suryati, S.E,M.Si)

Kaitannya dengan tugas kami adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, karena dalam industri perikanan sangat berkembang terkait kualitas produk atau dalam hal ini budidaya ikan yang juga tergantung dengan lingkungan tempat budidaya tersebut. Selama ini yang kami tahu bahwa kita lihat sendiri bagaimana kondisi ruang laut kita dan juga danau dan sumber air lainnya yang kiranya itu sangat memerlukan informasi juga terkait bagaimana dengan kualitas daripada ikan tersebut, oleh karena itu kami ingin melacak posisi dimana sehingga kita bisa lihat apakah disekitar tersebut ruang hidupnya sudah mulai tercemar. Juga saat ini kami melihat dari kegiatan program yang sangat krusial tentang target untuk kepatuhan pelaku usaha perikanan. Mohon informasi karena itu juga menjadi ranah kami dan juga nanti mungkin tanggung jawab kita bersama apa yang terjadi dengan kepatuhannya tersebut. Jadi apa

mungkin ada yang bisa kita kolaborasi untuk kegiatan penegakan, penataan dari pada kepatuhan dari pelaku usaha.

6. **Badan Riset Inovasi Daerah** (Ir. I Nyoman Suarta, M.Si)

Berkaitan dengan forum ini sebenarnya sangat bagus sekali apalagi jika seluruh kabupaten/kota bisa hadir seperti Badung, karena polis kebijakan ada di Kepala Dinas karena nantinya yang menjadi sasaran dari *Blue Economy* itu yaitu kita di daerah maritim. Seperti Bangli mungkin tidak memiliki laut tapi punya danau, seluruh kabupaten/kota di Bali memiliki potensi, berkaitan dengan itu masukan dan saran dari kami mungkin nantinya di sarankan dari masing-masing kabupaten/kota apa unggulan dan potensi yang dimiliki agar nantinya ketika kita memberikan bantuan tidak mubasir. Sehingga bisa dari beberapa daerah Provinsi Bali maupun beberapa Tingkat Kabupaten/Kota bisa berkolaborasi dan sama-sama mewujudkan program-program unggulan masing-masing Kabupten/Kota. Dan begitu juga teman-teman di kabupaten/kota, khususnya di Perikanan dan Kelautan. Kita kan sudah ada contoh, Karangasem ada garam Tulamben. Itu dulunya garam yang tidak memiliki harga, hanya Rp. 5.000 per kilogram. Sekarang nilainya sudah Rp. 250.000 per 200 gram. Masukan kami dari Brista terkait pemerataan apalagi terkait program prioritas nasional yaitu *Blue Economy* untuk Bali mungkin bisa di persiapkan untuk rumput lautnya dari jumlah petaninya, berapa produksinya, skema hulu dan hilirnya, disana sudah ada pariwisata tinggal kita buat produknya, setelah itu buat kemasannya yang menarik dan modern sehingga petani tidak tergantung lagi untuk melakukan ekspor rumput laut.

7. BPPSDMKP (Ibu Komang)

mengenai kebijakan ekonomi untuk sektor kelautan dan perikanan, kebijakan strategi sektor kelautan dan perikanan, sinergi komunitas pusat dan daerah serta dukungan komunitas daerah dalam penyelenggaraan program KKP akan di selenggarakan pelatihan eksekutif kepemilikan strategi sektor kelautan dan perikanan. Mohon selanjutnya, partisipasi aktif dari para pimpinan daerah di provinsi Bali karena materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali, yaitu sektor kelautan dan perikanan tahun 2026.

8. Bappeda Provinsi Bali (A.A. Ngurah Mahadiksita Sadhaka, S.Sos)

Apa yang telah di paparkan oleh Bapak Kepala Dinas sudah sejalan dengan Visi dan Misi Bapak Gubernur tadi sudah dibahas dari segi produksi, bagaimana meningkatkan produksi untuk ekspor, Kemudian terkait dengan tujuan utamanya, terkait dengan pendapatan-pendapatan daerah itu kami sangat dukung, tapi kami ingatkan juga karena di satu sisi kita mengembangkan misi konservasi, di satu sisi kita ada eksplorasi untuk perusahaan bagaimana menyeimbangkan itu sehingga tidak semata-mata mengejar pendapatan tau-tau konservasi atau alam kita rusak, karena mungkin kelebihan wisatawan. Untuk itu mungkin perlu adanya kajian terkait daya hitung, daya tampung mungkin. Secara umum semuanya sudah sesuai dengan prioritas kegiatan yang dituangkan dalam visi-misi Bapak Gubernur. Terakhir masalah anggaran dan ujung-ujungnya nanti artinya akan dibahas di TAPD dan kita masih berproses selanjutnya masih ada musrembang lagi, mungkin nanti di sana dipertajam lagi sehingga akses pendanaan atau mendapatkan prioritas.

Untuk lebih lengkapnya terkait hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu dapat dilihat pada **Lampiran**. (Tabel T-C. 29, Tabel T-C. 30, Tabel T-C. 31 dan Tabel T-C. 32).





BAB III

TUJUAN DAN

SASARAN

PERANGKAT

DAERAH

Pada Bab ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025



3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Prioritas Pembangunan Nasional yang berkaitan dan sektor Kelautan dan Perikanan secara ringkas yaitu :

1. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Terkait dengan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu Meningkatkan perekonomian Krama Bali dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi serta Mewujudkan Stabilitas Harga - Harga Kebutuhan Bahan Pokok dengan indikator Angka Inflasi, hasil atau *outcome* yang di harapkan nantinya yaitu untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang menjadi prioritas atau Sasaran Pemerintah Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali;
2. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok.

Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil;
2. Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB;
3. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan;
4. Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Strategis untuk menunjang kegiatan Kesekretariatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026 yaitu:

1. Meningkatnya Manajemen Kinerja Organisasi.

Strategi dan Arah Kebijakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu:

Tabel 3. 1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

TUJUAN/SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Tujuan 1	T1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali			
Indikator Tujuan	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
Sasaran	S1.1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	ST1.1.1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya	Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi
			ST1.1.2	Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan	Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
			ST1.1.3	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN)
	S1.2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah	ST1.2.1	Pemberdayaan masyarakat pesisir	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	ST1.2.2	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Tujuan 2	T2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok			
Indikator Tujuan	:	Angka Inflasi			
Sasaran	S2.1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	ST2.1.1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap	Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap
	S.2.2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	ST2.2.1	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dikembangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kelautan dan Perikanan berisikan mengenai :

3.3.1 Faktor - Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

a. Pengentasan Kemiskinan di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pengentasan kemiskinan di Sektor Kelautan dan Perikanan memerlukan berbagai pertimbangan strategis agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien. Faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan meliputi:

- 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Program yang dirumuskan harus mempertimbangkan kelestarian sumber daya laut dan perikanan. Hal ini

termasuk memastikan bahwa praktik penangkapan ikan tidak merusak ekosistem dan dapat mempertahankan populasi ikan untuk jangka panjang.

- 2) **Pemberdayaan Masyarakat:** Pertimbangan ini melibatkan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat pesisir untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik.
- 3) **Sarana dan Prasarana yang Memadai:** Penyediaan perahu tempel dan kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan akan membantu mereka mencapai lokasi penangkapan ikan dengan lebih cepat dan efisien, serta Penyediaan alat tangkap ikan yang berkualitas dan sesuai dengan jenis ikan yang ditangkap akan meningkatkan jumlah dan kualitas hasil tangkapan.

b. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

1) Potensi Perikanan Tangkap:

Provinsi Bali memiliki potensi perikanan tangkap yang signifikan, dengan sumber daya ikan yang melimpah di berbagai wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di sekitarnya, potensi ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Bali.

Gambar 3. 1
Potensi Perikanan Tangkap

Potensi Sumber Daya Ikan	Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap:	Komoditas Potensial/Pendukung:
1. SDI di perairan laut wilayah Bali (0 – 12 mil laut): • Potensi lestari = 147.278,75 ton/tahun ✓ Ikan pelagis = 123.906,0 ton/tahun ✓ Ikan demersal dan ikan karang = 23.372,75 ton/tahun • Tingkat pemanfaatan (2019-2023) = 70,36 % 2. SDI di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (12-200 mil laut): • WPP-NRI 573 = 1.267.540 ton/tahun • WPP-NRI 718 = 1.992.730 ton/tahun 3. SDI di kawasan antarwilayah Laut Bali (>12 mil laut) • WPP-NRI 713 = 1.177.857 ton/tahun	1. Tuna: • Kapasitas produksi :18.000 – 20.000 ton/tahun • Sentra produksi: Denpasar, Buleleng, Karangasem 2. Cakalang: • Kapasitas produksi : 10.000 – 12.000 ton/tahun • Sentra produksi: Denpasar, Buleleng, Karangasem 3. Tongkol: • Kapasitas produksi: 22.000 – 25.000 ton/tahun • Sentra produksi: Buleleng, Karangasem, Klungkung 4. Lemuru: • Kapasitas produksi: 20.000 – 30.000 ton/tahun • Sentra produksi: Jembrana, Badung	1. Lobster: • Kapasitas: 150 – 200 ton/tahun • Sentra: Gianyar, Badung, Tabanan 2. Ikan dasar – kurisi, kerapu, layur, kakap, beronang: • Kapasitas: 2.000 – 5.000 ton/tahun • Sentra: Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan 3. Cumi-cumi: • Kapasitas: 5.000 – 10.000 ton/tahun • Sentra: Buleleng, Jembrana, Denpasar 4. Ikan layang: • Kapasitas: 7.000 – 10.000 ton/tahun • Sentra: Buleleng, Jembrana 5. Ikan lemadang, layaran, setuhuk: • Kapasitas: 5.000 – 10.000 ton/tahun • Sentra: Denpasar, Buleleng, Badung

2) Potensi Perikanan Budidaya:

Provinsi Bali memiliki potensi perikanan budidaya yang besar, didukung oleh kondisi alam yang ideal dan keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan pengelolaan yang tepat, perikanan budidaya di Bali dapat menjadi sektor yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Gambar 3. 2
Potensi Perikanan Budidaya

Potensi Sumber Daya Lahan/Perairan	Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya:	Komoditas Baru Potensial
- Potensi Perairan Budidaya Laut: 9.122,5 Ha - Lokasi: Buleleng, Karangasem, Jembrana, Klungkung, Denpasar - Tingkat pemanfaatan = 0,4 % - Potensi Lahan Budidaya Air Payau: 1.501 Ha - Lokasi: Buleleng, Jembrana - Tingkat pemanfaatan = 22,8 % - Budidaya Lahan Budidaya Air Tawar: 15.968 Ha - Lokasi: seluruh kabupaten/kota - Tingkat pemanfaatan = 7,2 %	- Benih ikan bandeng: 5 miliar ekor/tahun (Buleleng) - Benih ikan kerapu: 25 juta ekor/tahun (Buleleng, Jembrana) - Benih Vanale: 1,5 miliar/tahun (Buleleng, Jembrana) - Ikan kerapu: 3.000 ton/tahun (Buleleng, Jembrana) - Udang vaname: 20.000 ton/tahun (Buleleng, Jembrana) - Rumput laut: 140.000 ton/tahun (Klungkung, Buleleng, Jembrana, Badung, Denpasar) - Ikan nila: 10.000 ton/tahun (Tabanan, Bangli, Jembrana) - kan gurami: 2.000 ton/tahun (Tabanan, Jembrana) - Lele: 5.000 ton/tahun (Tabanan, Jembrana, Denpasar) - Udang galah: 1.000 ton/tahun (Gianyar, Karangasem)	- Abalon: Klungkung, Buleleng, Karangasem - Kepiting bakau: Jembrana, Buleleng, Denpasar - Rajungan: Klungkung, Buleleng - Teripang: Klungkung, Buleleng - Lobster: Buleleng, Karangasem, Jembrana - Anggur laut: Buleleng - Kakap putih: Buleleng - Kakap air tawar: Tabanan, Jembrana

3) Potensi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan:

Provinsi Bali memiliki potensi pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang melimpah, menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan nilai tambah produk kelautan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sektor ini secara berkelanjutan.

Gambar 3. 3
Potensi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

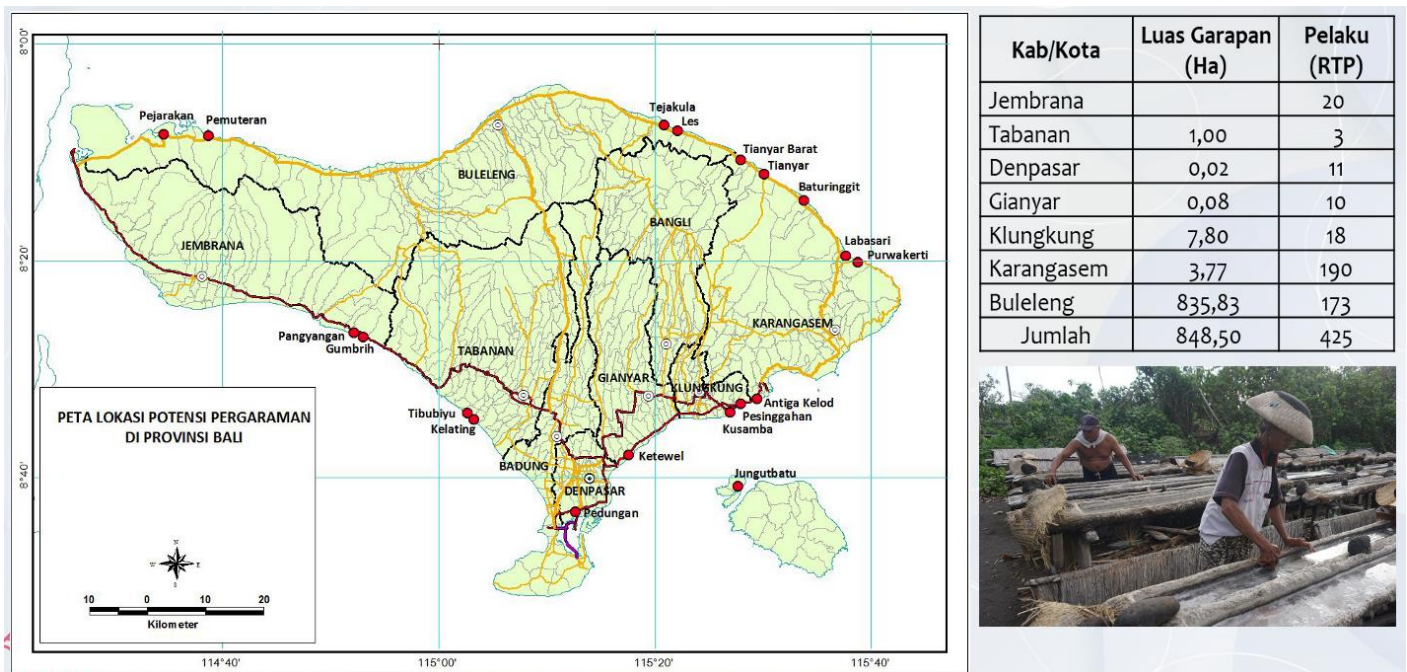
Jenis & Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	3. Sentra/Pemusatan Industri Pengolahan Ikan:
- Usaha mikro dan kecil pengolahan & pemasaran hasil perikanan : - Jumlah UMK: 931 unit ✓ Pemindangan = 126 UMK ✓ Pembekuan = 23 UMK ✓ Pemindangan = 433 UMK ✓ Pengolahan Produk Segar = 80 UMK ✓ Pengasapan/Pengeringan = 29 UMK ✓ Penggaraman/Pengeringan = 45 UMK ✓ Pereduksian = 24 UMK ✓ Pengolahan lainnya = 171 UMK - Tenaga kerja = 17.541 orang Pelaku Usaha: CV = 18; Koperasi = 2; Badan Hukum lainnya = 26 - Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Non-UPI Menengah dan Besar - Jumlah Usaha = 74 perusahaan - Tenaga Kerja = 30.668 orang - Jenis Usaha: ikan kaleng, produk beku, produk segar, ekstrak rumput laut, ikan hidup, snack ikan (stick & chip), abon ikan, fish jelly products, keripik belut, spirulina powder	- Sentra/Pemusatan Industri Pengolahan Ikan: - Sentra pemindangan: Kusamba (Klungkung) = 80 UMK - Pelabuhan Benoa = 27 UMB - Denpasar Selatan = 13 UMB - Pengambangan = 12 UMB - Gerokgak = 7 UMB



4) Garam Tradisional Lokal Bali:

Garam tradisional lokal Bali merupakan warisan budaya yang tak ternilai, diproduksi secara tradisional dengan teknik yang telah diwariskan secara turun temurun, mencerminkan kekayaan alam dan keahlian lokal dalam menghasilkan garam berkualitas tinggi.

Gambar 3. 4
Garam Tradisional Lokal Bali



5) Potensi Perikanan Produk Hias Laut:

Potensi perikanan produk hias laut di Bali menawarkan peluang besar dalam mengembangkan pasar internasional, dengan keanekaragaman spesies yang memikat dan mendukung industri pariwisata serta keberlanjutan ekosistem laut.

Gambar 3. 5
Potensi Perikanan Hias Laut

1. Ikan hias:
 - Ikan-ikan karang non-konsumsi beragam jenis
 - Lokasi: Buleleng, Karangasem, Denpasar, Jembrana
2. Biota laut non ikan (Avertebrata)
 - Jenis: kerang-kerangan & siput, udang hias, bulu babi, bintang laut, Anemon Laut, dll.
 - Lokasi: Buleleng, Karangasem, Denpasar, Jembrana
3. Karang hias:
 - Karang hias budidaya
 - Lokasi budidaya: Buleleng, Karangasem, Denpasar



c. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

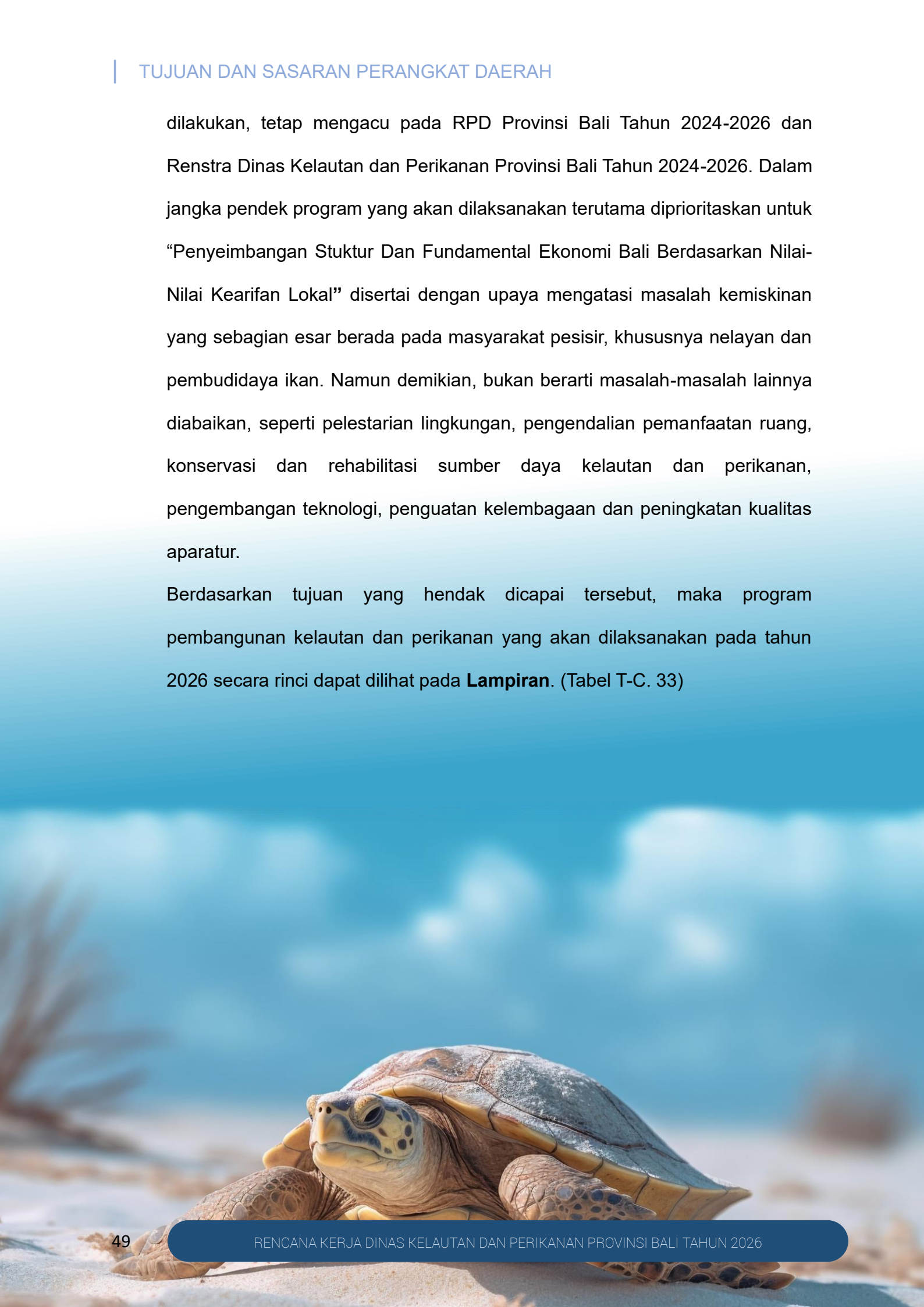
Dalam upaya menghadapi peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha di daerah atas diselenggarakannya penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang lebih efektif dan lebih mudah, dibutuhkan kesiapan pengawasan kegiatan usaha yang lebih efektif, efisien, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan sinergitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Bali.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program pembangunan kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategi dan arah kebijakan yang

dilakukan, tetap mengacu pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dalam jangka pendek program yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan untuk “Penyeimbangan Stuktur Dan Fundamental Ekonomi Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal” disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang sebagian esar berada pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Namun demikian, bukan berarti masalah-masalah lainnya diabaikan, seperti pelestarian lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran**. (Tabel T-C. 33)





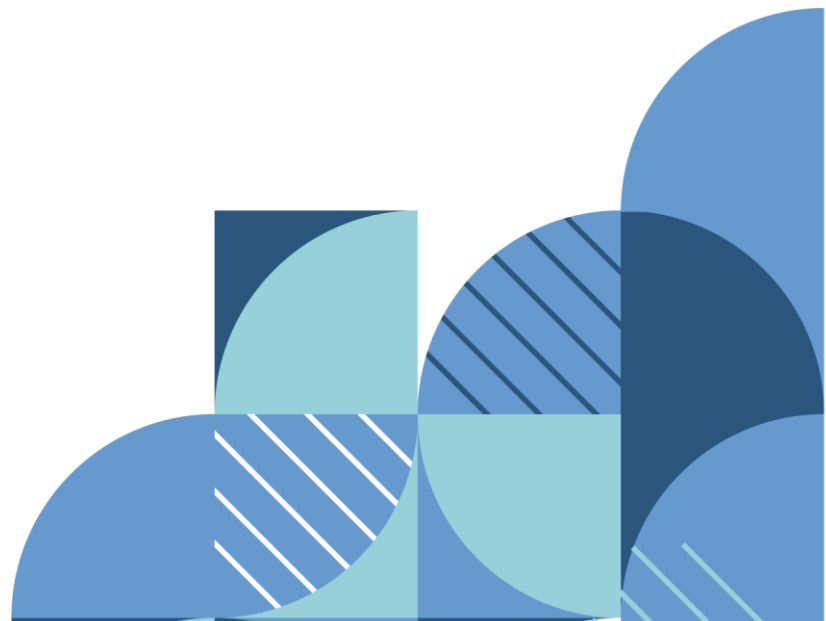
BAB IV

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Pada Bab IV Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali akan diuraikan tentang rencana kerja dan pendanaan yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah



4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026

Untuk melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 33.034.605.409,00. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

2.1 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K

2.1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.1.3 Sub Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru

2.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

2.2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

3.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

3.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

3.2 Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

3.2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

3.3 Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

3.3.1 Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

4.1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

4.1.1 Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

4.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

5.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi

5.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sampai dengan 12 Mil sesuai Kewenangan Provinsi

5.1.3 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai dengan 12 Mil sesuai dengan Kewenangan Provinsi

5.1.4 Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

5.2 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

5.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Kewenangan Provinsi

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

6.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6.1 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

6.2.1 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*

6.2.2 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar*

6.2 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6.3.1 Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Secara detail Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam **Lampiran.** (Tabel T-C. 33)





BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan antara lain Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut



5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 memuat Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2026. Penyusunan Renja ini telah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis. Renja ini merupakan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam menyusun Pra Rencana Kerja dan Anggaran (pra-RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026.

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bukan ditentukan oleh dokumen Renja melainkan implementasinya terutama adanya dukungan dari sektor terkait lainnya, dan masyarakat secara luas serta adanya komitmen dan kerja keras dari segenap aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam mencapai harapan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 untuk setiap program, kegiatan dan sub

kegiatan yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran serta mengacu pada ketentuan yang berlaku;

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali wajib mengevaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bidang terkait dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali;
3. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 ini dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan ; dan
 - c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada Tahun 2024 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun

2024-2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan . Kami berharap, bahwa Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 pada urusan Kelautan dan Perikanan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui Perubahan Rencana Kerja.

Demikian, dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2026 telah disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 15 Agustus 2025

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali**



Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003



LAMPIRAN

Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (9) = (8/7) x 100%	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (10) = 6 + 8	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (11) = (10/5) x 100%	Keterangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-13				
				K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	27.303.626.747,00	0,00	81	Nilai Sakip	27.303.626.747,00	81	24.645.474.156,00	100%	90,26%	24.645.474.156,00	90,26%	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN		0,00	60	Dokumen	20.987.785.114,00	60	18.966.480.223,00	100%	90,37%	18.966.480.223,00		
	3.25.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0,00	118	Orang/Bulan	20.987.785.114,00	95	18.966.480.223,00	81%	90,37%	18.966.480.223,00		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		0,00	100	Persen	1.193.233.000,00	100	962.227.859,00	100%	80,64%	962.227.859,00		
Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100	Persen		100	100%								
Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100	Persen		100	100%								
Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100	Persen		100	100%								
	3.25.01.1.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0,00	5	Paket	21.005.000,00	5	17.130.000,00	100%	81,55%	17.130.000,00		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2	Paket		2	100%								
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	Paket		1	100%								
	3.25.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	7	Paket	703.343.200,00	7	558.516.210,00	100%	79,41%	558.516.210,00		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	Paket		1	100%								
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10	Paket		10	100%								
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	Paket		1	100%								
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	Paket		1	100%								
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5	Paket		5	100%								
	3.25.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0,00	1	Paket	305.437.300,00	1	258.768.300,00	100%	84,72%	258.768.300,00		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	Paket		1	100%								
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	Paket		1	100%								
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	Paket		1	100%								
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	Paket		1	100%								
	3.25.01.1.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0,00	3	Paket	20.475.500,00	3	12.961.560,00	100%	63,30%	12.961.560,00		
	3.25.01.1.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	12	Laporan	142.972.000,00	12	114.851.789,00	100%	80,33%	114.851.789,00		
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		0,00	100	Persentase (%)	433.643.300,00	100	365.991.000,00	100%	84,40%	365.991.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			100	Persen		100	100%								
Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			100	Persen		100	100%								
Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			100	Persen		100	100%								
Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			100	Persen		100	100%								
	3.25.01.1.07.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00	3	Unit	433.643.300,00	3	365.991.000,00	100%	84,40%	365.991.000,00		
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	Unit		1	100%								
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	Unit		1	100%								
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3	Unit		3	100%								
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			100	Persentase (%)		100	100%					

	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik				0,00	100 Persen	377.754.905,00	100	309.505.812,00	100%	81,93%	309.505.812,00			
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0,00	12 Laporan	375.762.905,00	12	307.845.812,00	100%	81,93%	307.845.812,00			
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00	12 Laporan	1.992.000,00	12	1.660.000,00	100%	83,33%	1.660.000,00			
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik				0,00	100 Persentase (%) 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.311.210.428,00	100 100 100 100 100	4.041.269.262,00	100%	93,74%	4.041.269.262,00			
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0,00	9 Unit	851.363.680,00	9	843.550.080,00	100%	99,08%	843.550.080,00			
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,00	3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit	2.387.670.968,00	3 1 1 1 3	2.204.125.718,00	100%	92,31%	2.204.125.718,00			
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,00	10 Unit 3 Unit	533.800.000,00	10 3	530.661.934,00	100%	99,41%	530.661.934,00			
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0,00	5 Unit 2 Unit 4 Unit 5 Unit	521.085.780,00	5 2 4 5	447.946.530,00	100%	85,96%	447.946.530,00			
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0,00	16 Unit	17.290.000,00	16	14.985.000,00	100%	86,67%	14.985.000,00			
2	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1.250.324.000,00			0,00	44 Persentase (%) 71 Persen	1.250.324.000,00	44 71	1.110.012.300,00	100%	88,78%	1.110.012.300,00		88,78%	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				0,00	102575,33 Ha	736.092.200,00	44813,58	665.238.050,00	44%	90,37%	665.238.050,00			

		Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan					4 Kawasan		3		75%					
	3.25.02.1.01.000 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				0,00	1 Dokumen	4.402.200,00	1	0,00	100%	0,00%			0,00	
	3.25.02.1.01.000 2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				0,00	44712,5 Ha	731.690.000,00	20057	665.238.050,00	45%	90,92%			665.238.050,00	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan				0,00	4 Kelompok	514.231.800,00	16	444.774.250,00	400%	86,49%			444.774.250,00	
	3.25.02.1.03.000 1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				0,00	40 Orang	514.231.800,00	40	444.774.250,00	100%	86,49%			444.774.250,00	
	3 3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			609.810.120,00	0,00	2 Persentase (%)	609.810.120,00	3,03	575.279.310,00	152%	94,34%			575.279.310,00	94,34%
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap				0,00	103.696,10 Ton	544.310.920,00	114.231,55	531.876.170,00	110%	97,72%			531.876.170,00	
	3.25.03.1.01.000 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0,00	4 Unit	544.310.920,00	1	531.876.170,00	25%	97,72%			531.876.170,00	
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan				0,00	8000 Ton	9.600.000,00	5190	9.600.000,00	65%	100,00%			9.600.000,00	
	3.25.03.1.09.000 2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan BKP yang Diterbitkan				0,00	30 rekomendasi	9.600.000,00	15	9.600.000,00	50%	100,00%			9.600.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan				0,00	8000 Ton	55.899.200,00	5190	33.803.140,00	65%	60,47%			33.803.140,00	
	3.25.03.1.06.000 3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				0,00	5 Layanan	55.899.200,00	2	33.803.140,00	40%	60,47%			33.803.140,00	
	4 3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			2.361.359.010,00	0,00	2 Persentase (%)	2.361.359.010,00	1,75	2.170.962.681,00	88%	91,94%			2.170.962.681,00	91,94%
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				0,00	32645,1 Ton	54.000.000,00	33180,95	52.500.000,00	102%	97,22%			52.500.000,00	
	3.25.04.1.05.000 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0,00	1 Unit	45.240.000,00	1	44.790.000,00	100%	99,01%			44.790.000,00	
	3.25.04.1.05.000 6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				0,00	6 Dokumen	8.760.000,00	6	7.710.000,00	100%	88,01%			7.710.000,00	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas				0,00	1250000 Ekor	2.307.359.010,00	3759775	2.118.462.681,00	301%	91,81%			2.118.462.681,00	
	3.25.04.1.06.000 1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00	2 Unit	1.423.299.391,00	2	1.349.088.711,00	100%	94,79%			1.349.088.711,00	
	3.25.04.1.06.000 2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00	17 Unit	884.059.619,00	17	769.373.970,00	100%	87,03%			769.373.970,00	
	5 3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			713.278.940,00	0,00	2 Persentase (%)	713.278.940,00	4,2	544.816.716,00	210%	76,38%			544.816.716,00	76,38%
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil				0,00	30 Pelaku Usaha	713.278.940,00	19	544.816.716,00	63%	76,38%			544.816.716,00	
	3.25.05.1.01.000 1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				0,00	1 Dokumen	218.576.140,00	4	118.866.716,00	400%	54,38%			118.866.716,00	
	3.25.05.1.01.000 4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas POKMASWAS yang Terdaftar dan Aktif				0,00	40 Kelompok	494.702.800,00	42	425.950.000,00	105%	86,10%			425.950.000,00	
	6 3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan			970.410.101,00	0,00	2 Persentase (%)	970.410.101,00	2,2	812.362.920,00	110%	83,71%			812.362.920,00	83,71%
			Tingkat Konsumsi Ikan					48,68 Kg/Kapita/Tahun		51,13		105%					
			Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan					2 Persen		2		100%					
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina				0,00	25 Unit Usaha	970.410.101,00	38	812.362.920,00	152%	83,71%			812.362.920,00	
			Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan					2500 rekomendasi		4010		160%					
	3.25.06.1.02.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				0,00	25 Unit Usaha		38		152%					

1	Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko						30 Unit Usaha		85		283%						
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				0,00		7 Unit Usaha	39.594.000,00	7	32.716.568,00	100%	82,63%		32.716.568,00			

Telaahan Hasil Evaluasi
Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan
1 IV Tahun 2024 : 9
Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan
2 IV Tahun 2024 : 26
Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada
3 Triwulan IV Tahun 2024 : 51

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Trealisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			79 Nilai	80 Nilai	N/A	N/A	N/A	79 Nilai	80 Nilai	N/A	N/A	N/A	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			N/A	N/A	81	82	83	N/A	N/A	82	82	83	
3	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya			4 Kawasan	5 Kawasan	N/A	N/A	N/A	2	4	N/A	N/A	N/A	
4	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola			1 Kawasan	1 Kawasan	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	
5	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			N/A	N/A	44%	46%	100%	N/A	N/A	44%	44%	100%	Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K dikali 100%
6	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			N/A	N/A	71%	73%	74%	N/A	N/A	96%	96%	74%	Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
7	Jumlah produksi perikanan tangkap			105.166,51 Ton	107.269,84 Ton	N/A	N/A	N/A	124.010,15 Ton	110.863,70 Ton	N/A	N/A	N/A	
8	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan			1 Pelabuhan	2 Pelabuhan	N/A	N/A	N/A	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	N/A	N/A	N/A	
9	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			N/A	N/A	2%	2%	2%	N/A	N/A	3,03%	3,03%	2%	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1) x 100%
10	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			18.981,20 Ton	19.360,82 Ton	N/A	N/A	N/A	32.060,08 Ton	31.220,50 Ton	N/A	N/A	N/A	
11	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut			3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	N/A	N/A	N/A	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	N/A	N/A	N/A	
12	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			N/A	N/A	2%	2%	2%	N/A	N/A	1,75%	1,75%	2%	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1) x 100%
13	Jumlah pelaku usaha taat Hukum			18 Pelaku Usaha	23 Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	
14	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			N/A	N/A	2%	3%	4%	N/A	N/A	2,20%	2,20%	4%	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang ter-data pada tahun berjalan
15	Jumlah produk perikanan bersertifikat			149 SKP	151 SKP	N/A	N/A	N/A	282 SKP	189 SKP	N/A	N/A	N/A	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Trealisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
16	Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan			4.950 Sampel	5000 SampeI	N/A	N/A	N/A	2.695 sampel	3.720 Sampel	N/A	N/A	N/A	
17	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan			N/A	N/A	2%	2%	2%	N/A	N/A	4,20%	4,20%	2%	Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun n-1)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun n-1) x 100%
18	Tingkat Konsumsi Ikan			N/A	N/A	48,68 Kg/Kpt/ Tahun	49,65 Kg/Kpt/ Tahun	50,64 Kg/Kpt/ Tahun	N/A	N/A	51,13 Kg/Kpt/Tahun	51,13 Kg/Kpt/Tahun	50,64 Kg/Kpt/ Tahun	AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
19	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan			N/A	N/A	2%	2%	2%	N/A	N/A	2,20%	2,20%	2%	Jumlah sampel yang di uji Tahun n - Jumlah sampel yang di uji Tahun - n)/Jumlah sampel yang di uji tahun -n x 100%)

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali Tahun 2026

No	Rancangan RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
			Capaian	Indikatif			Capaian	Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	29.250.891.625,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	29.250.891.625,00	Sesuai
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	100%	145.066.492,00	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	100%	145.066.492,00	Sesuai
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	70.066.492,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	70.066.492,00	Sesuai
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	50.000.000,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	50.000.000,00	Sesuai
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	4%	223.917.384,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	4%	223.917.384,00	Sesuai
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2%	209.500.492,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2%	209.500.492,00	Sesuai
		Tingkat Konsumsi Ikan	50,64			Tingkat Konsumsi Ikan	50,64		Sesuai

No	Rancangan RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
			Capaian	Indikatif			Capaian	Dana	
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	626.332.460,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	626.332.460,00	Sesuai
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	375.132.984,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	375.132.984,00	Sesuai
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	557.265.968,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	557.265.968,00	Sesuai
2	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2%	150.000.000,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2%	150.000.000,00	Sesuai
UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	900.324.820,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	900.324.820,00	Sesuai
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	74%	149.990.200,00	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	74%	149.990.200,00	Sesuai
UPTD PELABUHAN PERIKANAN									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	276.116.492,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	276.116.492,00	Sesuai

No	Rancangan RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
			Capaian	Indikatif			Capaian	Dana	
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	50.000.000,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	50.000.000,00	Sesuai
Total				33.034.605.409,00	Total				33.034.605.409,00

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju tahun 2027
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
			Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran										
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			33.034.605.409			48.531.600.000		
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			29.949.442.485			37.155.000.000		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik									Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87			87		Survey Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi								Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	83			83		Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	83	29.250.891.625		83	34.580.000.000	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01	1.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	156.708.000		100	180.000.000	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	25	01	1.01	0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	116.708.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	4	130.000.000	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01	1.01	0007	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	40.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	4	50.000.000	
		Tersusunnya laporan keuangan dengan baik	3	25	01	1.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	60	26.400.815.889		60	28.000.000.000	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3	25	01	1.02	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1610	26.332.115.889	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1610	28.000.000.000	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	25	01	1.02	0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	68.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	68.700.000	
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	218.634.592		100	1.455.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN	
										Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	25	01	1.06	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	5	10.000.000	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	7	950.000.000	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	136.670.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	5	250.000.000	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	12.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	25.000.000	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	25	01	1.06	0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	64.463.992	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	220.000.000	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	0		100	350.000.000	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	350.000.000	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	168.611.000		100	175.000.000	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.611.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	5.000.000	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	165.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	170.000.000	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	2.306.122.144		100	4.420.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	25	01	1.09	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		9	911.065.336	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	9	1.300.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3	1.287.256.808	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	3.000.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		10	107.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	10	120.000.000	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen		5,85 (5,35-6,35)			5,85 (5,35-6,35)		PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil								Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen		6%			6%		= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	PERSEN		100%	145.066.492		100%	445.000.000	= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	3	25	02	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Ha		102.575,33	35.000.000		102.575,33	335.000.000	
		Terehabitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01	0003	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha		1	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	110.000.000	
		Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	3	25	02	1.01	0005	Sub Kegiatan : Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen materi teknis muatan perairan pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen		1	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	165.000.000	
		Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	3	25	02	1.01	0008	Sub Kegiatan : Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha		15	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	15	60.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	Kelompok	6		110.066.492		6	110.000.000	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03	0001	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	60		110.066.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	60	110.000.000	
Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok									Angka inflasi	Persen	3±1				3±1		Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan								Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,28				100,28		Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	PERSEN	2%		70.066.492		2%	240.000.000	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3	25	03	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	107.885,42		55.066.492		107.885,42	200.000.000	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	1.01	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	4		55.066.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	4	200.000.000	
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	1.09		Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	9.000		15.000.000		9.000	40.000.000	
		Ditetapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	3	25	03	1.09	0001	Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	30		15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	30	40.000.000	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,85 (5,35-6,35)				5,85 (5,35-6,35)		PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,25				6,25		Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budiday	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PERSEN	2%		50.000.000		2%	35.000.000	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN	
										Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran		
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Laut	3	25	04	1.05		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.963,86	50.000.000		33.963,86	35.000.000	
		Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.05	0013	Sub Kegiatan : Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Dokumen	24	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	24	35.000.000	
Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok								Angka inflasi	Persen	3±1			3±1			Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan							Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	4%			4%			Xkp=(X1+X2+X3+X4)/4 X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	PERSEN	4%	223.917.384		4%	915.000.000	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelakun usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan
		Terselenggaranya pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	3	25	05	1.01		Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Pelaku Usaha	34	207.576.884		34	750.000.000	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	3	25	05	1.01	0013	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai dengan 12 Mil sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	9.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	10	165.000.000	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	3	25	05	1.01	0014	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sampai dengan 12 Mil sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	12.593.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	10	165.000.000	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3	25	05	1.01	0016	Sub Kegiatan : Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	14	49.491.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	14	200.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3	25	05	1.01	0017	Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat		40	135.891.584	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	40	220.000.000	
		Terselenggaranya kegiatan pengawasan kepada unit usaha perikanan	3	25	05	1.02		Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan	Unit Usaha		28	16.340.500		28	165.000.000	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	3	25	05	1.02	0004	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha		28	16.340.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	28	165.000.000	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen		5,85 (5,35-6,35)			5,85 (5,35-6,35)		PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen		6,25			6,25		Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN	Persen		2%	209.500.492		2%	940.000.000	= ((Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun - n)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun -n x 100%)
									TINGKAT KONSUMSI IKAN	KG/ KAPITA/ TAHUN		50,64			50,64		AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
		Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	3	25	06	1.01		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	Unit Usaha		50	131.170.000		50	220.000.000	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	3	25	06	1.01	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen		1	131.170.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	220.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	Unit Usaha	50	29.624.000		50	660.000.000		
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	3	25	06	1.02	0004	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	50	29.624.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	50	660.000.000		
		Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	06	1.03		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Potensi Peluang Usaha Investasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Potensi	2	48.706.492		2	60.000.000		
		Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	25	06	1.03	0001	Sub Kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	2	48.706.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2	60.000.000		
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA												1.001.465.444			3.950.000.000		
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik									Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87			87		Survey Kepuasan Masyarakat	
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi								Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	83			83		Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	83	626.332.460		83	1.000.000.000	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN	
										Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran		
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	46.277.200		100	134.500.000	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	25	01	1.06	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	4.664.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	11.000.000	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.117.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	11.000.000	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	32.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	110.000.000	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.996.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2	2.500.000	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	19.000.000		100	55.000.000	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	19.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	55.000.000	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	129.210.800		100	277.500.000	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	611.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	2.500.000	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	128.599.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	275.000.000	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	431.844.460		100	533.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	166.497.984	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	5	200.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	261.046.476	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	300.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	4.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	33.000.000		
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,85 (5,35-6,35)			5,85 (5,35-6,35)		PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS	
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,25			6,25		Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budiday	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PERSEN	2%	375.132.984		2%	2.950.000.000	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya)/(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya x 100%)	
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Darat	3	25	04	1.06		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	1.350.000	375.132.984		1.350.000	2.950.000.000		
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3	25	04	1.06	0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	1.300.000.000		
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	125.132.984	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	1.650.000.000		
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN												707.265.968			3.679.200.000		
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik									Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87			87		Survey Kepuasan Masyarakat	
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi								Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	83			83		Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai		83	557.265.968		83	1.399.200.000	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen		100	48.441.700		100	68.200.000	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	25	01	1.06	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	6.008.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	14.000.000	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3	8.932.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	10.000.000	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	32.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	43.000.000	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2	1.200.000	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen		100	20.952.000		100	110.000.000	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	20.952.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	110.000.000	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen		100	116.000.000		100	213.000.000	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	73.000.000	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	115.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	140.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
										Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	371.872.268		100	1.008.000.000	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	65.279.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	4	110.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	291.812.968	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	880.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	14.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2	18.000.000	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali								Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,85 (5,35-6,35)			5,85 (5,35-6,35)		PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB							Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,25			6,25		Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSEN	2%	150.000.000		2%	2.280.000.000	= ((Jumlah sample yang di uji Tahun n - Jumlah sample yang di uji Tahun - n)/Jumlah sample yang di uji tahun -n x 100%)
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rekomendasi	2.700	150.000.000		2.700	2.280.000.000	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	3	25	06	1.02	0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	7	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	7	80.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
											Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	3	25	06	1.02	0004	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	7	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	7	2.200.000.000	
UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI												1.050.315.020			3.304.000.000	
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik									Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87			87		Survey Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi								Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	83			83		Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	83	900.324.820		83	1.554.000.000	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	122.138.700		100	126.000.000	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	25	01	1.06	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	9.823.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3	40.000.000	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.018.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	10.000.000	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	47.198.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	44.000.000	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.499.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2	25.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	25	01	1.06	0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	33.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	7.000.000		
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	500.000		100	110.000.000		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	110.000.000		
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	40.000.000		100	68.000.000		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	24.000.000		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	44.000.000		
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	737.686.120		100	1.250.000.000		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	142.021.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	5	90.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	510.664.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	1.050.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	85.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	110.000.000		
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,85 (5,35-6,35)			5,85 (5,35-6,35)		PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil									Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%			6%		= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02	1.01		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE PEFEKTIFITAS KAWASAN KONSERVASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	PERSEN		74%	149.990.200		74%	1.750.000.000	= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	3	25	02	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan		5	149.990.200		5	1.750.000.000	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01	0002	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha		46.838,10	149.990.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	46.838,10	1.200.000.000	
		Terehabitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01	0003	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha		1	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	550.000.000	
UPTD PELABUHAN PERIKANAN													326.116.492			443.400.000	
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik									Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		87			87		Survey Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi								Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		83			83		Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai		83	276.116.492		83	383.400.000	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen		100	88.225.000		100	110.000.000	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	25	01	1.06	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	11.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		10	28.975.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	10	33.000.000	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	32.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	36.000.000	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	0	0	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	25	01	1.06	0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	26.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	30.000.000	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen		100	20.000.000		100	44.000.000	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	44.000.000	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	1	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen		100	20.091.492		100	22.400.000	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	2.400.000	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	18.091.492	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12	20.000.000	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		100	147.800.000		100	207.000.000	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		2	127.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2	140.000.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN ANTARA	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
												Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1	67.000.000		
Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok									Angka inflasi	Persen	3±1			3±1		Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS	
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan								Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,28			100,28		Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Persen	2%	50.000.000		2%	60.000.000	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)	
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	1.06		Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	Ton	9.000	50.000.000		9.000	60.000.000		
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	5	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	5	60.000.000		